

KOORDINASI DALAM PROGRAM KAMPUNG KB DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

Fauziah Riska Rahmeina

Email : FrRahmeina@gmail.com

Dosen Pembimbing : Nur Laila Meilani, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761) 63277

ABSTRACT

Coordination is an important role in an organization to archive the desired goal. Kampung KB Program as an implementation of program related to partners of BKKBN Riau Province. This research aims to obtain a description the coordination among BKKBN Riau Province, Population control and family planning office of pekanbaru city, and field line in Kampung KB implementation of Pekanbaru city and to identify the factors that affect the coordination of Kampung KB program of Pekanbaru city.

Blade analysis in this study comes from the book written by Malayu Hasibuan involving that coordination includes cooperation, communication, division of task and discipline. This research uses qualitative-descriptive method. In data collection, writer uses interviewing technique, observation, documentation and questionnaires. Using purposive sampling as an information source and interactive model as data analysis technique.

The result of the research indicate that the coordination that has been done by BKKBN Riau Province and The controlling service of population and family planning of Pekanbaru city has been running optimally but the coordination to cross sectoral and the regional tool not yet optimal. Coordination is influenced by several factors : budget and advocacy to cross-sectoral.

Keywords: *Socialization, Rusunawa, Program*

PENDAHULUAN

Penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah serta laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk akan mendorong pembangunan disemua aspek dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Masalah kependudukan di Indonesia sampai saat sekarang belum dapat diatasi. Permasalahan ini antara lain diwarnai jumlah yang besar dengan pertumbuhan yang tinggi, serta angka kelahiran yang tinggi. Secara garis besar terdapat tiga aspek permasalahan kependudukan di Indonesia yaitu struktur usia muda, kualitas kependudukan, dan persebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata (BKKBN, 2013).

Mengingat keadaan penduduk di Kota Pekanbaru besar jumlahnya dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, maka perlu dirintis usaha-

usaha untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk terutama melalui pengendalian tingkat kelahiran. Berbagai masalah kependudukan masih perlu ditanggulangi agar hasil pembangunan makin dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Masalah-masalah ini meliputi penyediaan berbagai kebutuhan pokok bagi jumlah penduduk yang terus bertambah seperti penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja.

Usaha penurunan tingkat pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui pengendalian tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian. Upaya pengendalian kelahiran dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB). Sebagaimana telah diketahui KB bertujuan mengatur kelahiran anak dan meningkatkan kesejahteraan ibu. Selanjutnya upaya penurunan tingkat kematian dilaksanakan dengan memperluas dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan program KB Nasional/BKKBN, maka keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan salah satu urusan wajib pemerintah diantaranya penanganan bidang kesehatan, perencanaan dan pengendalian pembangunan, pelayanan kependudukan dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian Peraturan Pemerintah RI tersebut menegaskan bahwa keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota wajib menyelenggarakan program KB dan program KS tersebut yang terangkum

dalam program Kampung Keluarga Berencana (KB).

Program Kampung Keluarga Berencana atau yang sering disebut Kampung KB merupakan salah satu Program Pemerintah dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana guna mensukseskan agenda prioritas pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan” dan agenda prioritas nomor lima “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Bapak Presiden RI.

Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu “Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis”. Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaplikasikan delapan fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan

pemasangan kontrasepsi akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya (BKKBN, 2016).

Pelaksanaan Kampung KB di kota Pekanbaru mulai dicanangkan pada bulan Mei 2016 lalu meliputi 4 (empat) kelurahan yakni Kelurahan Kampung Bandar, Sri Meranti, Meranti Pandak dan Pesisir. Pelaksanaan program kampung KB di keempat kelurahan tersebut merupakan wilayah yang memenuhi beberapa kriteria pembentukan kampung KB yakni Kumuh; Pesisir/Nelayan; Daerah aliran sungai; Bantaran kereta api; Kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan); Terpencil; Perbatasan; Kawasan Industri; Kawasan wisata; dan Padat penduduk.

Program Kampung KB di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari belum terlaksananya program ini di beberapa kelurahan yang telah dicanangkan dan hanya satu kelurahan yang baru menjalankan program ini yaitu kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh.

Berdasarkan hal di atas maka dalam realisasinya sangat memerlukan berjalannya koordinasi, baik itu koordinasi antar unit-unit yang ada dalam organisasi maupun dengan instansi atau pihak-pihak terkait. Menurut **Herujito (2001:121)** koordinasi adalah pengaturan yang tertib dari suatu kumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi merupakan syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan harmonis dan efisien.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana, BKKBN Provinsi Riau memerlukan koordinasi yang baik

dimana koordinasi ini akan memudahkan terlaksananya program kampung KB itu sendiri. Dalam hal ini BKKBN Provinsi Riau berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dan beberapa instansi baik instansi pemerintahan maupun lembaga swasta dan bagian lini lapangan. Koordinasi ini dilakukan untuk mencapai program pembangunan sektor terkait dengan kampung KB diantaranya kesehatan, sosial-ekonomi, pendidikan, dan pemukiman dan lingkungan.

Namun kenyataan yang ada dilapangan program Kampung KB ini tersendat dalam pelaksanaannya sehingga hanya satu kelurahan yang baru melaksanakan program Kampung KB. Tidak hanya itu pencanangan Kampung KB seharusnya Januari 2016 serentak seluruh Indonesia tetapi untuk Kota Pekanbaru adanya keterlambatan dan baru dicanangkan pada bulan Mei 2016. Kurangnya koordinasi dari para aparat pelaksana program akan mengakibatkan pelaksanaan program tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga tujuan dari program ini belum tercapai.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul penelitian yaitu: **“Koordinasi dalam Program Kampung KB di Kota Pekanbaru”**

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena yang ditemukan dilapangan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Koordinasi dalam Program Kampung KB di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi dalam program Kampung KB di Kota Pekanbaru?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis bagaimana Koordinasi dalam program Kampung KB di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Koordinasi dalam program Kampung KB di Kota Pekanbaru.

C. KONSEP TEORI

1. Koordinasi

Menurut **Manullang (2008:12)**, *coordinating* atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberi penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan *coaching* (pelatihan) dan bila perlu memberi teguran.

Koontz dan O'donel (2000:44) menyatakan bahwa koordinasi yang baik hendaklah memuat hal-hal yang sebagai berikut :

1. Adanya perencanaan yaitu menyangkut proses persiapan dan pelaksanaan secara sistematis dari pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
2. Adanya hubungan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan.
3. Adanya pertemuan melalui rapat.

Menurut **Henry Fayol dalam Inu Kencana syafie (2006:85)** koordinasi adalah meningkat

bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan usaha. Untuk terciptanya suatu organisasi yang baik menurut **Henry Fayol** dalam **Syamsi S.U (2001:14)** berupa :

1. Antara unit dan sub unit dengan unit lainnya dapat bekerja sama dengan serasi.
2. Masing-masing unit dan sub unit mengetahui bagian tugas yang mana yang harus bekerja sama dengan unit lainnya.
3. Unit atau sub unit harus dapat menyesuaikan diri dengan jadwal waktu kerjasama dengan unit/sub unit lainnya.

Hasibuan (2006:85) mengatakan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Ada dua tipe koordinasi menurut **Hasibuan (2006:86)** yaitu :

1. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
2. Koordinasi horizontal (*horizontal coordination*) adalah mengkoordinasi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat.

Dalam pelaksanaan tugas organisasi, koordinasi memegang peranan penting bagi tercapainya tujuan utama yang telah ditetapkan oleh organisasi bersangkutan.

Melayu Hasibuan (2006:87) menyebut adapun tujuan koordinasi yaitu :

1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan sarat pemikiran kearah tercapainya sasaran organisasi.
2. Untuk menjurus keterampilan spesialisasi kearah sasaran organisasi.
3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tujuan dan sasaran.
5. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur-unsur manajemen (man, money, material, machine, method, market) ke arah sasaran organisasi.
6. Untuk menghindari kegiatan yang overlepping dari sasaran organisasi.

Hasibuan (2006:88) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut :

a. Kerjasama

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kerjasama adalah inti daripada koordinasi. Kerjasama dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kerjasama ini merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk

memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranana dalam menciptakan komunikasi.

c. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah

perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggungjawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

d. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan untuk itu diperlukan disiplin.

Dalam penelitian ini didefinisikan bahwa koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (**E.F.L. Brech dalam Hasibuan, 2007:85**). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Hasibuan yaitu kerjasama, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Koordinasi dalam penelitian ini dilakukan antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana atau bahkan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kota Pekanbaru.

2. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (UUD

1945 pasal 26 ayat 2). Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Pengertian program keluarga berencana menurut UU No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Program KB adalah bagian yang terpadu (*integral*) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spritual, dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional (Depkes, 1999).

Menurut *World Health Organisation* (WHO) expert committee 1997 : keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami isteri utuk

menghindari kehamilam yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga (Suratun, 2008)

Keluarga Berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi (Mochtar, 1998).

Secara umum Keluarga Berencana dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta keluarganya yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut. Diharapkan dengan adanya perencanaan keluarga yang matang kehamilan merupakan suatu hal yang memang sangat diharapkan sehingga akan terhindar dari perbuatan untuk mengakhiri kehamilan dengan aborsi (Suratun, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi dalam Program Kampung KB di Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa koordinasi program Kampung KB di Kota Pekanbaru, maka penulis menggunakan teori *Malayu Hasibuan (2006:88)* dengan indikator yaitu:

1. Kerjasama

Kerjasama adalah suatu usaha bersama atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hekekatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain, begitu juga dengan instansi pemerintah. Di dalam kerjasama harus adanya saling

pengertian dalam melaksanakan tugas sehingga rencana yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

Kerjasama yang terjalin antara BKKBN, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, dan Lini Lapangan sudah berjalan dengan baik namun kerjasama dengan lintas sektoral masih belum terlaksana dengan baik karena ada beberapa mitra kerja yang belum bekerjasama dalam program Kampung KB.

2. Komunikasi

Komunikasi dibutuhkan untuk mengkoordinasi seluruh pihak terkait kebijakan yang akan diterapkan mulai dari jabatan paling atas hingga paling bawah. Apabila tujuan serta sasaran dari suatu kebijakan tersebut tidak ada kejelasan maka kemungkinan akan adanya kesalahan dalam berbagai hal sehingga implementasi kebijakan tersebut pun tidak akan terlaksana dengan baik.

komunikasi antara BKKBN Provinsi Riau dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru sudah terjalin cukup optimal dan komunikatif. Namun komunikasi ke lini Kelurahan belum berjalan dengan komunikatif dikarenakan kurangnya sosialisasi ke tingkat Kelurahan dan perangkat lini lapangan lainnya.

Komunikasi juga dapat berupa rapat, dalam pertemuan/rapat dapat dilaporkan hasil pelaksanaan tugas, hambatan maupun kendala apa yang dihadapi untuk dimusyawarahkan bersama. Dalam pertemuan rapat antara BKKBN Provinsi Riau dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru untuk membahas dan memecahkan

masalah yang dihadapi sehingga dapat mendorong terjadinya koordinasi secara maksimal.

3. Pembagian Tugas

Pembagian tugas merupakan pemecahan tugas sedemikian rupa agar orang yang bertugas bertanggung jawab dengan pekerjaan yang mereka lakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi supaya tercapainya tujuan organisasi. Pembagian tugas atau sering juga disebut dengan *division of work* juga bertujuan untuk mempermudah melakukan kerja berdasarkan bagian-bagiannya tersebut. Kerjasama antar organisasi maupun sesama anggota organisasi itu sendiri diperlukan pembagian tugas untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Untuk mengetahui peran instansi yang berkoordinasi dalam program Kampung KB dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Pembagian Tugas dalam Kampung KB

No	Instansi	Ranah/Tupoksi
1	BKKBN Provinsi Riau	Kependudukan dan Keluarga Berencana.
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru	Kependudukan dan Keluarga Berencana.
3	Dinas Kesehatan	Pelayanan KB, Kesehatan Masyarakat.
4	Dinas Pendidikan	Pengentasan buta huruf, mengurangi angka putus sekolah.

5	Dinas PU	Pembangunan Jalan, jembatan, dll.
6	Dinas Sosial	Mensejahterakan masyarakat.
7	KUA	Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)

Pembagian tugas merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas yang telah dibebankan. Rincian tugas yang dilakukan juga bertujuan untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan. Sebab rincian tugas yang dilakukan akan mengarahkan setiap instansi mengerjakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Untuk itu dalam suatu pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan rincian tugas yang jelas untuk masing-masing unit kerja yang menerima beban tugas tersebut.

4. Disiplin

Kata disiplin mempunyai arti ketaatan dan kepatuhan pada peraturan. Kedisiplinan berarti ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan, kaedah, norma-norma, dan hukum-hukum yang berlaku. Semua aturan dan tata tertib tentu mengandung nilai-nilai yang positif dan setiap orang dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh disiplin. Terciptanya disiplin yang tinggi dimulai dari masing-masing dan dikembangkan melalui perilaku pribadi yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang disiplin.

Disiplin kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh pihak-pihak terkait dalam melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan

program Kampung KB di Kota Pekanbaru untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Sikap disiplin juga mampu menunjukkan evaluasi setiap peraturan yang diberlakukan apakah kebijakan atau peraturan tersebut sudah dilaksanakan dengan seharusnya atau tidak.

Kedisiplinan akan berhasil diterapkan baik itu pada individu maupun kelompok apabila terdapat kesadaran akan tugas yang dimiliki tidak hanya cukup dengan sadar akan tugasnya saja tetapi harus dibarengi dengan kesiapan atau kesediaan bagi individu maupun kelompok itu sendiri. Kesadaran terhadap tugas oleh BKKBN Provinsi Riau dan Dinas Pengendalian Penduduk Kota Pekanbaru selaku instansi yang berkoordinasi dalam Program Kampung KB sangat perlu, hal ini juga tentunya harus dibarengi dengan kesiapan dalam mengemban tugas demi berhasilnya tujuan program Kampung KB di Kota Pekanbaru.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Koordinasi dalam Program Kampung KB di Kota Pekanbaru

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam program Kampung KB di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran tentu saja sangat dibutuhkan dalam sebuah dinas pemerintahan atau organisasi, karena anggaran disini sangat mempengaruhi hasil kerja instansi tersebut.⁷

Program Kampung KB merupakan program yang tergolong baru sehingga secara spesifik belum ada alokasi khusus untuk anggarannya, sehingga untuk dukungan anggaran masuk pada bagian program KKBPK tahun 2015-2019. BKKBN Provinsi Riau alokasinya masuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan untuk dinas tiap daerah berasal dari APBD atau sumber lainnya.

Anggaran dalam Program Kampung KB hanya dana dari APBN melalui BKKBN Provinsi Riau sejumlah Rp. 15.000.000 yang disediakan untuk keperluan Pencanangan Kampung KB sementara anggaran untuk mini lokakarya, rapat, dan evaluasi kegiatan belum ada anggarannya sehingga ini menjadi salah satu hambatan dalam koordinasi.

2. Advokasi ke Lintas Sektoral

Keberhasilan Program Kampung KB dilihat dari keterlibatan dan dukungan lintas sektoral, baik Pemerintahan maupun swasta. Untuk memperoleh dukungan atau komitmen dari para pejabat lintas sektoral diperlukan adanya advokasi. Advokasi merupakan upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak terkait (*stakeholders*).

Masih minimnya Advokasi ke lintas sektoral menyebabkan kurangnya dukungan dari sektor-sektor terkait. Selain itu kesibukan masing-masing sektor dalam menjalankan program-program mereka.

Kampung KB hendaknya juga disinergikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dibawah kementerian sosial yang bertujuan untuk memutus kemiskinan serta membantu keluarga yang sangat miskin memenuhi kesehatan, pendidikan dan pangan, apabila dikaitkan dengan Kampung KB maka akan membantu kegiatan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Selain itu, ada pula program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dan Program Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, namun kenyataannya setiap program masih berjalan sendiri-sendiri sehingga belum didapat hasil yang maksimal.

Program Kampung KB merupakan program yang bersifat lintas sektoral, maka diperlukan koordinasi dan penajaman program serta kegiatan pembangunan yang intensif antara semua instansi terkait. Karena kunci penentu kesuksesan Kampung KB adalah koordinasi semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Koordinasi BKKBN Provinsi Riau dalam Program Kampung KB di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam Program Kampung KB di Kota Pekanbaru berdasarkan indikator koordinasi yaitu sebagai berikut :
 - a. Kerjasama antara BKKBN Provinsi Riau dengan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru sudah terjalin dengan baik sama halnya dengan kerjasama ke lini lapangan namun untuk kerjasama dengan lintas sektor belum terjalin dengan baik karena hanya satu instansi yang menjadi mitra kerja dalam program Kampung KB yaitu Dinas Kesehatan.

- b. Komunikasi BKKBN Provinsi Riau dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik namun untuk komunikasi ke bagian lini lapangan seperti Kecamatan dan Kelurahan masih kurang baik karena kurangnya Advokasi. Rapat antara BKKBN Provinsi Riau dengan Dinas Pengendalian Penduduk Kota Pekanbaru belum teragenda dalam pelaksanaan program Kampung KB.
 - c. Pembagian tugas BKKBN Provinsi Riau dalam berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya berdasarkan arahan dan tupoksi masing-masing instansi.
 - d. Disiplin para pegawai BKKBN Provinsi Riau, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik dengan mentaati peraturan yang telah ditetapkan.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi BKKBN Provinsi Riau dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program Kampung KB, yaitu anggaran yang belum memadai dalam pelaksanaan Kampung KB dan Kurangnya Advokasi ke Lintas sektoral.

SARAN

Melengkapi penelitian ini sebagai bahan masukan baik yang bersumber dari hasil penelitian maupun sebagai bentuk kepedulian dan informasi bagi pemerintah khususnya BKKBN Provinsi Riau dan Dinas Pengendalian Penduduk Kota Pekanbaru serta Pengurus Kampung KB maka peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. BKKBN Provinsi Riau diharapkan agar memperkuat penggarapan Kampung KB secara lintas sektor karena terkait dengan program pembangunan lainnya seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya.
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai OPD Pelaksana Kampung KB diharapkan juga memperkuat Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait dengan lebih gencar melakukan Advokasi dan ajakan Ke instansi lain agar berkoordinasi dalam pelaksanaan Program Kampung KB sehingga timbul kesadaran dari instansi-instansi tersebut agar bekerjasama mensukseskan Kampung KB.
3. Pengurus kampung KB diharapkan agar lebih membina masyarakat dengan melakukan sosialisasi sehingga pemahaman masyarakat tentang kampung KB meningkat.
4. Kelurahan Pesisir diharapkan agar lebih berperan aktif dalam mensukseskan program Kampung KB.

DAFTAR PUSTAKA

BKKBN. 2016. *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Jakarta : BKKBN

_____. 2016. *Integrasi Kampung KB Bersama Mitra Kerja*. Jakarta : BKKBN

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta

Daft, Richard L. 2010. *Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Salemba Empat

Handayani, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta

Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara

_____. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Cetakan 9 Bumi Aksara

_____. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara

Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Koontz Harold dan O'donel Cyrill. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bhatara

Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Mochtar, Rustam. 1998. *Sinopsis Obstetri Jilid I*. Jakarta : EGC

Ndraha, Taliziduhun. 2003. *Kybernology : Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta

Syafri, Wirman H. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga

- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta : Rineka Cipta
- Syamsi S.U, Ibnu. 2001. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suratun, dkk. 2008. *Pelayanan Keluarga Berencana & Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta : Trans Info Media
- Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press
- _____. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press
- Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset
- White, D. Leonard. 2000. *Introduction Studi of Public Administration*. Jakarta : Intermedia
- Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Wursanto. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andy
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Berkaitan Dengan Program KB
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Dokumen

- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional